

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  
dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal  
pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  
Tahun 2016–2020**

**Imam Khulwani, Risal Rinofah, Pristin Prima Sari**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta

[khulwanii@gmail.com](mailto:khulwanii@gmail.com)

**ABSTRACT.**

*This study aims to determine the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, partially and simultaneously effecting Capital Expenditures in Regencies/Cities in the Province of the Special Region of Yogyakarta (DIY) in 2016-2020. The type of research used is the type of quantitative research. Secondary data obtained from the website (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>). In this study, it was analyzed using descriptive analysis and multiple linear regression analysis and processed with SPSS version 25. The results of this study indicate that partially: the Regional Original Income (PAD) variable has a partial effect on Capital Expenditures in 4 regencies and 1 city in the Special Region of Yogyakarta (DIY), the General Allocation Fund (DAU) does not partially affect Capital Expenditures, the Special Allocation Fund (DAK) has an effect on Capital Expenditures in 4 districts and 1 city in the Province of the Special Region of Yogyakarta (DIY). Meanwhile, simultaneously: Variables of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) simultaneously have a significant effect on Capital Expenditures in 4 districts and 1 city in the Special Region of Yogyakarta (DIY.) with the period 2016-2020.*

**Keywords:** *Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.*

**ABSTRAK.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2016-2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Data sekunder yang diperoleh dari website (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>). Pada penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda dan diolah dengan SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial : variabel Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal pada 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sedangkan secara

simultan : Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan periode 2016-2020.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang efektif diberlakukan per Januari tahun 2001. Undang-Undang ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

APBD merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah. Penggunaan anggaran pembangunan dapat bermacam-macam, yaitu untuk membangun infrastruktur jalan, gedung kantor, pembelian mobil dinas dan lain sebagainya (Adisasmita, 2011). Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan ke pemerintah daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, dana perimbangan tersebut dipisahkan menjadi dana Alokasi Umum (DAU), dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini masing-masing sebesar 25% dari total APBN. DAU lebih diperuntukan bagi pemerintah pembiayaan di daerah dimana daerah bebas menggunakan DAU (block grant). Kontribusi DAU terhadap total penerimaan daerah sangat dominan, yaitu sebesar 50% - 60% sehingga turunnya DAU dari pemerintah pusat sangat ditunggu-tunggu daerah dan besarnya RAPBD akan menunggu dulu perolehan DAU dari pusat (Marselina, 2015).

Salah satu provinsi di Indonesia yang menerima keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan dan biaya iprasional pada kelompok belanja administrasi

umum (PMK No. 101 Tahun 2011). Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama: (a) Belanja Modal Tanah, (b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, (c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan (e) Belanja Modal fisik lainnya (Peraturan Menteri Keuangan No. 101 Tahun 2011).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling. Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

**Tabel 1**  
**Kriteria Smpel**

No	Kriteria Seleksi Sampel	Sesuai Kriteria
1	laporan Realisasi APBD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diperoleh data dari <a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id">http://www.djpk.kemenkeu.go.id</a>	5
2	Jumlah sampel yang diteliti	5
3	Jumlah Pengamatan (Tahun)	5
4	Jumlah Total Sampel Selama periode Penelitian	25

Sumber: Data diolah, 2021.

Sumber Data berupa dokumen Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Metode Pengumpulan Data diperoleh langsung dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Pemerintah di daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2016-2020 dan membaca literature yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, membaca buku-buku dan artikel-artikel dengan masalah yang diteliti.

Tempat dan Waktu Pengambilan Data

**Tabel 2**  
**Tempat dan Waktu Pengumpulan Data**

Sumber	Laporan Realisasi APBD pada Google
URL	<a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id">http://www.djpk.kemenkeu.go.id</a>
Tanggal Mengunduh	02 Agustus 2021

Analisis data dilakukan secara Kuantitatif dengan dilanjutkan pengujian hipotesis yang meliputi penetapan hipotesis, uji statistik, yaitu dengan uji korelasi, regresi linier berganda, uji statistic t, uji statistic F, dan koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Data penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 3

Realisasi Pendapatan Daerah (dalam juta rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Bantul	349.597	369.224	432.545	448.858	469.798
Kab. Sleman	717.151	698.754	762.514	867.643	2.852.716
Kab. Gunung Kidul	206.279	192.374	226.984	254.810	245.880
Kab. Kulon Progo	180.273	249.692	211.047	237.876	217.553
Kota Yogyakarta	515.345	511.132	551.493	636.084	671.770

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel diatas, daerah dengan PAD tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 periode 2016-2020 adalah Kabupaten Sleman.

## 2. Data penelitian Dana Alokasi Umum (DAU)

Tabel 4

Realisasi Dana Alokasi Umum (dalam juta rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Bantul	999.814	1.072.226	982.250	1.009.528	1.025.870
Kab. Sleman	1.014.310	1.051.041	996.492	1.026.081	1.046.968
Kab. Gunung Kidul	954.997	1.024.163	938.211	965.080	976.430
Kab. Kulon Progo	718.490	705.868	705.868	732.088	663.335
Kota Yogyakarta	670.278	670.278	658.504	691.457	701.377

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, daerah dengan DAU tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 periode 2016-2020 adalah Kabupaten Sleman

## 3. Data penelitian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tabel 5

Realisasi Dana Alokasi Khusus (dalam juta rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Bantul	119.437	332.063	356.069	342.041	339.124
Kab. Sleman	240.745	317.082	339.256	335.82 5	339.127

Kab. Gunung Kidul	253.997	301.675	303.863	342.547	379.614
Kab. Kulon Progo	130.506	210.264	247.883	293.857	263.848
Kota Yogyakarta	184.651	150.285	188.130	171.069	165.689

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, daerah dengan DAK tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 periode 2016-2020 adalah Kabupaten Sleman. Tetapi DAK tertinggi diantara Kabupaten/Kota yang lain terdapat pada Kabupaten Bantul

#### 4. Data penelitian Belanja Modal

Tabel 6

Realisasi Belanja Modal (dalam juta rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Bantul	335.332	315.617	421.696	384.774	393.336
Kab. Sleman	334.002	387.514	364.638	421.482	503.490
Kab. Gunung Kidul	234.691	340.666	304.835	493.784	450.221
Kab. Kulon Progo	241.983	258.776	340.494	421.395	320.782
Kota Yogyakarta	287.443	294.401	263.212	308.047	339.946

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, daerah dengan belanja daerah tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 periode 2016-2020 adalah Kabupaten Sleman.

#### Analisis Deskriptif

Tabel 7

Statistik Deskriptif (dalam jutaan rupiah)

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	25	234691	503490	350502.28	73239.027
PAD	25	180273	2852716	523095.68	527908.735
DAU	25	658504	1072226	880040.16	160242.730
DAK	25	119437	379614	265945.88	79911.661
Valid (listwise)	N 25				

Sumber : SPSS versi 25, data diolah 2021

**1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai minimum PAD terdapat pada Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016. Pendapatan asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai maksimum yang terdapat pada kabupaten sleman pada tahun 2020. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 523.095,68 dengan nilai standar deviasi Rp. 527.908.735. Hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah seluruhnya merata.

**2. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Uum (DAU) menunjukkan bahwa nilai minimum terdapat pada Kota Yogyakarta pada tahun 2018. Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai maksimum terdapat pada Kabupaten Bantul pada tahun 2017. Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar RP. 880.040,16 lebih besar dibandingkan standar deviasi yang memiliki nilai sbesar Rp. 160.242,730. Hal ini membuktikan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum seluruhnya merata.

**3. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan bahwa nilai minimum terdapat pada Kabupaten Bantul pada tahun 2016. Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan nilai maksimum terdapat pada Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2020. Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 265.945,88 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi sebesar Rp. 799.116,61. Hal ini menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penyebaran yang tidak seluruhnya merata.

**4. Belanja Modal**

Belanja modal memiliki nilai minimum pada Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2016. Belanja modal memiliki rata-rata (mean) sebesar Rp. 350.502,28 lebih besar dibandingkan standar deviasi yakni sebesar Rp. 73.239,02. Dengan

demikian dapat disimpulkan pada variabel belanja modal sangat baik pada periode pengamatan.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Tabel 8

**Hasil Output Uji Kolmogorov Smirnov (K-S)  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		25
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	46021.093521 06
Most Extreme Differences	Absolute	.141
	Positive	.141
	Negative	-.122
Test Statistic		.141
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

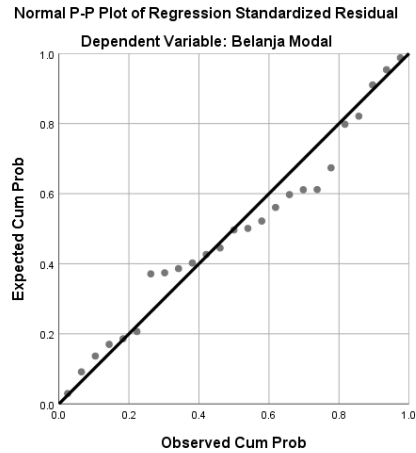
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : SPSS versi 25, data diolah 2021

Berdasarkan tabel tersebut, nilai probabilitas signifikansi asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Hal ini membuktikan bahwa data sudah terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah sepenuhnya dapat digunakan untuk melakukan uji hipotesis.

**Grafik 1  
Grafik Normal Probability Plot**





Sumber : SPSS versi 25, data diolah 2021

Pada grafik 1 di atas dapat diketahui Grafik Normal Probability Plot dimana titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Uji Multikolinieritas

**Tabel 9**  
**Hasil Output Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	PAD	.933	1.071
	DAU	.511	1.958
	DAK	.531	1.885

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : SPSS versi 25, data diolah 2021

		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
	Model	Tolerance	VIF
diatas variabel nilai VIF	1	PAD	.933
		DAU	.511
		DAK	.531

a. Dependent Variable: Belanja Modal  
maka tidak multikolinieritas.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai tolerance dari 3 independen > 0,10 dan dari 3 variabel independen < 10, dapat disimpulkan terjadi gejala

### 3. Uji Autokolerasi

**Tabel 10**  
Hasil Output Uji Autokolerasi

Runs Test	
	Unstandardize d Residual
Test Value <sup>a</sup>	-420.98669
Cases < Test Value	12
Cases >= Test Value	13
Total Cases	25
Number of Runs	11
Z	-.810
Asymp. Sig. (2-tailed)	.418

a. Median

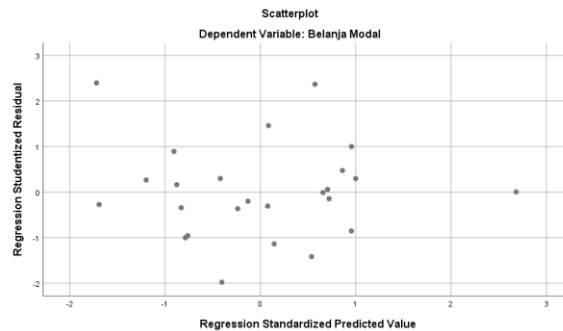
Sumber : SPSS versi 25, data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diketahui bahwa menghasilkan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 atau 5% yaitu 0,418. Maka dapat dsimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi.

### 4. Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 1**

Hasil Output Uji Heteroskedesitas



Sumber : SPSS versi 25, data diolah 2021

Berdasarkan gambar 1 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi, sehingga antara variabel independen dan dependen tidak saling berinteraksi. Hal ini membuktikan bahwa model regresi layak digunakan.

## 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 11

Hasil Output Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	174237.057	56518.748		3.083	.006
	PAD	.047	.020	.342	2.407	.025
	DAU	-.010	.088	-.022	-.117	.908
	DAK	.604	.173	.659	3.498	.002

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : SPSS versi 25, data diolah 2021

Dari hasil tabel diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) bernilai positif yaitu sebesar Rp. **174.237.057** artinya menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hasil konstanta atau sama dengan nol, maka besarnya nilai belanja modal menurun sebesar Rp. **174.237.057**.

2. Koefisien X1 bernilai positif yaitu sebesar 0,047 artinya jika variabel Pendapatan Asli Daerah naik 1% dan variabel lain diasumsikan konstan maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,047%.
3. Koefisien X2 bernilai negatif yaitu sebesar -0,10 artinya jika variabel Dana Alokasi Umum naik 1% dan variabel lain diasumsikan konstan maka belanja modal akan mengalami penurunan sebesar 0,10%.
4. Koefisien X3 bernilai positif yaitu sebesar 0,604 artinya jika variabel Dana Alokasi Khusus naik 1% dan variabel lain diasumsikan konstan maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,604%

## Uji Hipotesis

### 1. Pengujian Hipotesis Parsial

Tabel 12

#### Hasil Output Uji Parsial (uji t)

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	174237.057	56518.748		3.083	.006
	PAD	.047	.020	.342	2.407	.025
	DAU	-.010	.088	-.022	-.117	.908
	DAK	.604	.173	.659	3.498	.002

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : SPSS versi 25, data diolah 2021

1. Diketahui untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilai sig. sebesar 0,025 < 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  2,407 >  $t_{tabel}$  2,080. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.
2. Diketahui untuk Dana Alokasi Umum (DAU) nilai sig. sebesar 0,908 > 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  -0,117 <  $t_{tabel}$  2,080. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.
3. Diketahui untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) nilai sig. sebesar 0,002 < 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  3,498 >  $t_{tabel}$  2,080. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, dari

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

## 2. Pengujian Hipotesis Simultan (uji f)

**Tabel 13**  
Hasil Output Uji Simultan (uji f)

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	77904335594.056	3	25968111864.685	10.728	.000 <sup>b</sup>
	Residual	50830585172.984	21	2420504055.856		
	Total	128734920767.040	24			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Sumber : SPSS versi 25, data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.12, maka dapat disimpulkan mengenai hasil uji simultan (uji f) diperoleh nilai  $f_{hitung}$  10,728 >  $f_{tabel}$  2,82 dan sig. 0,000 < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## 3. Uji Koefisien Determinasi (R<sub>2</sub>)

**Tabel 14**  
Hasil Output Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.778 <sup>a</sup>	.605	.549	49198.618

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : SPSS versi 25, data diolah 2021

Berdasarkan 4.13 diatas diketahui nilai Adjusteed R Square sebesar 0,549 yang berarti bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK) mampu menjelaskan sebanyak 54,9% variasi variabel dependen (Belanja Modal). sedangkan sisanya sebesar 45,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Koefisien regresi Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Belanja Modal sebesar 0,047 dengan tingkat signifikan 0,025. Hal ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode 2016-2020 yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

### **2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal sebesar -0,010 dengan tingkat signifikan 0,908. Hal ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, uji ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Persentase pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota adalah 10% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dialokasikan kepada provinsi dan 90% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dialokasikan kepada kabupaten/kota. Perhitungan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional adalah minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto).

### **3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Koefisien regresi Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal sebesar 0,604 dengan tingkat signifikan 0,002. Hal ini membuktikan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode 2016-2020 yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Hasil ini memberikan indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat di pengaruhi oleh sumber penerimaan Alokasi Khusus (DAK).

### **4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil yang di tunjukan penelitian ini bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK) mampu menjelaskan sebanyak 54,9% variasi variabel dependen (Belanja Modal). sedangkan sisanya sebesar 45,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan : (1).Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal pada 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode 2016-2020. Pendapatan tertinggi dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah dll. (2).Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum dihasilkan dari pendapatan APBN. (3).Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode 2016-2020. Hasil ini memberikan indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat di pengaruhi oleh sumber penerimaan Alokasi Khusus (DAK). (4). Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode 2016-2020.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah : (1). Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan untuk selalu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan fasilitas umum di setiap daerah. Di harapkan dapat tepat sasaran dalam menjalankan program pemerintah daerah yang sedang di jalankan. (2). Bagi Peneliti Selanjutnya, bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis, disarankan sebaiknya untuk menambah objek penelitian, selain itu untuk penelitian kedepannya, penulis sangat mengharapkan adanya perbaikan. Observasi mendalam sangat di harapkan agar dapat menghasilkan informasi yang lebih mendalam pula.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Achmad David Hermawan & Anwar Made. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(2), 1–11.

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Aditya, Dina M, E., dan M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8.
- Agus Waskito. (2012). *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan*. Buku Pintar. Yogyakarta.
- Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., & Hadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–13.
- Dougherty, C. (2002). *Introduction to Econometrics*. 2nd ed. New York: Oxford University Press.
- Elvia Puspa Dewi. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2017. *Jurnal Akuntansi STIE International Golden Institute - Jakarta Email*, 01(04), 8–26.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Jurnal FFEB Unmul*, 14(1), 44–52.
- Gendro Wiyono. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta.
- Ghozali Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 23*. Edisi ke-8 Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan Witjaksana. (2005). *Pokok-pokok Pikiran Dalam Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Semarang: STIKOM Semarang.
- isti Permatasari. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5, 8.
- Karnila Ali & Nur Wahyu Ningsih. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i1.3445>
- Kesit Bambang Prakosa. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 8(2), 101–118.
- Marselina. (2015). *Membedah APBD*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mayang Sari Nasution. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli



- Serdang). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 151(2), 10–17.
- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. (2006). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Permendagri. Jakarta.
- Muhammad Edwin Khadafi. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. *Skripsi*, 3.
- Muz'an Sulaiman. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Universitas Tanjungpura, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Volume 2*, 80–90.
- Ni Luh Dina Selvia Martini, Wayan Cipta, I. W. S. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006 - 2012. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1.
- Noerdiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Skripsi Univiversitas Negeri Semarang*, 2(1), 45–51.
- Permendagri, N. 13 T. (2006). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri), Nomor 13 Tahun 2006*.
- PMK No. 101 Tahun 2011. (n.d.). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Klasifikasi Anggaran. 2011, 2.
- PP Republik Indonesia No. 55 Tahun. (2005). *Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Dana Perimbangan*. Jakarta. 5.
- PP Republik Indonesia No. 71 Tahun. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta. 7.
- Rachmawati A. Rifai. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Journal Katalogis*, 5(7), 169–180.
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.445>
- Santosa, A. B., & Rofiq, M. A. (2013). dapatan Asli Daerah (PAD), Dana Aloksi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat , Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007 – 2010). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 184–198.

- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Subaygo dan Siswantoro. (2003). Pengaruh DAU, PAD, SILPA dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal, Sektor Publik. BPFU UGM, Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta. In *Statistika untuk Penelitian*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.
- Sumarmi, S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I.Yogyakarta. *Assets*, 5(1), 5–11.
- Suryana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal The Influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2), 67–74.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 183–191.
- Syaiful. (2006). Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. *Makalah*.
- Undang-Undang No 9 Tahun. (2005). *Republik Indonesia, 2005, Undang-undang nomor 9: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , Depdagri, Jakarta*. 9.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. (n.d.). *Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang Nomor 22: Pemerintahan Daerah, Depdagri, Jakarta*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun. (2014). *Republik Indonesia, 2014, Undang-undang nomor 23: Pemerintahan Daerah, Depdagri, Jakarta*.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. (n.d.). *Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang Nomor 25: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah [JDIH BPK RI], Depdagri, Jakarta*. 9.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. (n.d.). *Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 32: Pemerintahan Daerah, Depdagri, Jakarta*. 4.

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Volume 4 No 4 (2022) 1050-1068 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: [10.47467/alkharaj.v4i4.776](https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.776)

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. (n.d.). *Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 33: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Depdagri, Jakarta. 4.*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun. (2000). *Republik Indonesia, 2000, Undang-undang nomor 34: Pajak dan Retribusi Daerah, Depdagri, Jakarta.*

Undang-Undang Nomor 55 Tahun. (2005). *Republik Indonesia, 2005, Undang-Undang Nomor 55: Dana Perimbangan, Depdagri, Jakarta.*

Wandira, A. G. 2013. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( Pad ), Dana Alokasi Umum ( Dau ), Dana Alokasi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia Tahun 2012). In *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.*

Widiasih, N. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, 18(3), 2143–2171.*

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan  
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 02 Agustus 2021).